

Perjuangan Menuju Tata Informasi Dunia Baru

SUKANTO*

Perang Dunia II tidak hanya merendahkan derajat kemanusiaan karena mengakibatkan korban jiwa manusia dan harta benda, melainkan juga telah merusak sendi-sendi diplomasi dan hubungan internasional. Akibat-akibat perang yang sungguh tidak manusiawi agaknya telah menyentuh budi dan hati nurani para negarawan, sehingga pemikiran dan tuntutan akan perdamaian semakin menonjol. Ini rupanya merupakan faktor utama yang memperlancar proses pembentukan badan dunia, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 26 Juni 1945, yang tujuan utamanya ialah mempertahankan dan memperkuat perdamaian serta mengembangkan ikatan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan persamaan, saling menghormati dan bekerjasama dalam segala bidang kegiatan manusiawi.

Dengan adanya iklim perdamaian, negara-negara yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam Perang Dunia II dapat mencurahkan segenap kekuatannya bagi pembangunan negara dan bangsanya. Namun dalam perkembangannya, kemajuan pembangunan negara-negara tersebut tidak sama. Kemajuan pembangunan negara-negara yang terlibat secara langsung dalam Perang Dunia II, antara lain Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, yang kemudian disebut sebagai negara-negara "Barat," serta Jepang, yang kemudian bersama-sama dengan negara-negara Barat disebut negara-negara "Maju," "Utara" atau "Dunia Pertama," ternyata lebih pesat, terutama dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi komunikasi dan informasinya. Ketimpangan kemajuan pembangunan tersebut, sering kali menimbulkan ketegangan hubungan internasional, baik hubungan negara-negara Dunia Pertama dengan negara-negara "Dunia Kedua," yaitu negara-negara yang diperintah oleh Partai-partai

*Staf CSIS.

Komunis, antara lain Uni Soviet dan negara-negara sekutu utamanya, maupun dengan negara-negara "Dunia Ketiga," "Dunia Keempat" dan "Dunia Kelima," yang disebut pula sebagai negara-negara "Berkembang," dan yang sebagian besar merupakan negara-negara "Selatan" atau "Non-Blok."¹

Khususnya dalam hubungan dengan negara-negara Dunia Ketiga dan yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok, ketegangan hubungan tersebut terutama disebabkan oleh dua masalah besar, yaitu masalah ketimpangan kemampuan ekonomi serta ketimpangan arus komunikasi dan informasi. Ketegangan mengenai masalah pertama, yaitu ketimpangan kemampuan ekonomi, semakin memuncak dan menjadi topik pembicaraan para pemimpin negara-negara Dunia Ketiga dalam tahun 1975, yang kemudian melahirkan konsepsi Tata Ekonomi Dunia Baru. Setelah melahirkan konsepsi itu, para pemimpin negara-negara Non-Blok juga merasakan bahwa di samping terjadinya ketimpangan kemampuan ekonomi, juga telah terjadi ketimpangan arus komunikasi dan informasi, yaitu adanya monopoli dan pemusatan arus komunikasi dan informasi pada negara-negara Dunia Pertama.

Masalah ketimpangan arus komunikasi dan informasi tersebut semakin meresahkan negara-negara Non-Blok dan telah dijadikan salah satu topik dalam Konperensi Puncak Negara-negara Non-Blok di Kolombo dalam tahun 1976, yang melahirkan konsepsi Tata Komunikasi dan Informasi Dunia Baru. Konsepsi ini pada dasarnya menghendaki terwujudnya sistem komunikasi dan informasi dunia yang sehat, terutama terciptanya arus komunikasi dan informasi yang adil dan berimbang antara negara-negara Dunia Pertama dan negara-negara Dunia Ketiga, Keempat serta Dunia Kelima. Dan konsepsi ini terus-menerus dimatangkan dalam Gerakan Non-Blok sendiri, baik melalui forum-forum simposium, seminar maupun konperensi-konperensi, seperti Konperensi Para Menteri Penerangan Negara-negara Non-Blok di Jakarta tanggal 26-30 Januari 1984, serta terus diperjuangkan dalam forum-forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mulai diimplementasikan dalam kerjasama bilateral negara-negara Non-Blok dengan negara-negara maju.

KEADAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DUNIA

Sebagaimana telah diketahui sebagian besar negara-negara Dunia Ketiga, Keempat dan Kelima, berada di benua Asia, Afrika dan Amerika Latin, serta baru mengalami kemerdekaan setelah Perang Dunia II. Negara-negara itu semula merupakan bekas jajahan negara-negara Eropa Barat dan sebagian besar bergabung dalam Gerakan Non-Blok. Dalam perkembangannya, ter-

¹Time, 22 Desember 1975.

Tabel 1

KEADAAN SOSIAL-BUDAYA DAN SOSIAL-EKONOMI NEGARA-NEGARA DI DUNIA

Negara-negara di Dunia	Penduduk Tahun 1981 (jutaan)	GNP Per Kapita		Melek Huruf 1980 (%)	Harapan Hidup 1981 (%)	Pertumbuhan Produksi 1970-1981		
		1981 (\$)	Pertumbuhan 1960-1981 (%)			Industri (%)	Manufaktur (%)	Jasa (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Negara-negara Berpendapatan Rendah</i>								
1. Kamboja	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Bhutan	1,3	80	0,1	—	45	—	—	—
3. Laos	3,5	80	—	44	43	—	—	—
4. Chad	4,5	110	-2,2	15	43	—	—	—
5. Bangladesh	90,7	140	0,3	26	48	9,0	11,2	5,3
6. Ethiopia	32,0	140	1,4	15	46	1,8	2,8	4,2
7. Nepal	15,0	150	0,0	19	45	—	—	—
8. Birma	34,1	190	1,4	66	54	5,6	4,6	4,7
9. Afghanistan	16,3	—	—	20	37	3,2	2,8	5,3
10. Mali	6,9	190	1,3	10	45	2,4	—	5,9
11. Malawi	6,2	200	2,7	25	44	—	—	—
12. Zaire	29,8	210	-0,1	55	50	-0,8	-2,3	-0,4
13. Uganda	13,0	220	-0,6	52	48	-9,8	-9,3	-0,7
14. Burundi	4,2	230	2,4	25	45	8,5	5,9	3,5
15. Volta Hulu	6,3	240	1,1	5	44	2,9	3,4	5,8
16. Ruanda	5,3	250	1,7	50	46	—	—	—
17. India	690,2	260	1,4	36	52	4,4	5,0	5,2
18. Somalia	4,4	280	-0,2	60	39	—	—	—
19. Tanzania	19,1	280	1,9	79	52	2,2	2,9	5,4
20. Vietnam	55,7	—	—	87	63	—	—	—
21. Cina	991,3	300	5,0	69	67	8,3	—	4,4
22. Guinea	5,6	300	0,2	20	43	—	—	—
23. Haiti	5,1	300	0,5	23	54	7,1	7,6	3,5
24. Srilangka	15,0	300	2,5	85	69	4,2	2,1	5,0
25. Benin	3,6	320	0,6	28	50	—	—	—
26. Republik Afrika Tengah	2,4	320	0,4	33	43	4,0	-4,3	—
27. Sierra Leone	3,6	320	0,4	15	47	-3,6	3,7	4,5
28. Madagaskar	9,0	330	-0,5	50	48	0,3	—	0,4
29. Niger	5,7	330	-1,6	10	45	11,4	—	6,9
30. Pakistan	84,5	350	2,8	24	50	5,5	4,4	6,1
31. Mozambik	12,5	—	—	33	—	—	—	—
32. Sudan	19,2	380	-0,3	32	47	3,2	1,5	6,0
33. Togo	2,7	380	2,5	18	48	6,2	-10,4	3,2
34. Ghana	11,8	400	-1,1	—	54	-2,2	-1,0	0,4
<i>Negara-negara Berpendapatan Menengah Bawah</i>								
35. Kenya	11,4	420	2,9	47	56	8,5	9,5	6,0
36. Senegal	5,9	430	-0,3	10	44	4,1	2,0	0,9
37. Mauritania	1,6	460	1,5	17	44	-4,0	4,6	5,2
38. Republik Arab Yaman	7,3	460	5,5	21	43	13,9	12,1	11,7
39. Republik Demokrasi Rakyat Yaman	2,0	460	—	40	46	—	—	—

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. Liberia	1,9		520	1,2	25	54	-0,7	5,6	1,4
41. Indonesia	149,5		530	4,1	62	54	11,2	13,9	9,5
42. Lesoto	1,4		540	7,0	52	52	12,6	9,6	9,2
43. Bolivia	5,7		600	1,9	63	51	3,7	5,3	5,2
44. Honduras	3,8		600	1,1	60	59	4,9	4,7	4,6
45. Zambia	5,8		600	0,0	44	51	-0,4	0,3	1,2
46. Mesir	43,3		650	3,5	44	57	7,6	8,7	11,8
47. El Salvador	4,7		650	1,5	62	63	3,3	2,4	3,3
48. Muangthai	48,0		770	4,6	86	63	9,9	10,3	7,5
49. Pilipina	49,6		790	2,8	75	63	8,4	6,9	5,3
50. Angola	7,8		—	—	—	42	—	—	—
51. Papua Nugini	3,1		840	2,5	32	51	—	—	—
52. Maroko	20,9		860	2,4	28	57	5,8	5,4	6,4
53. Nikaragua	2,8		860	0,6	90	57	2,1	2,8	-0,8
54. Nigera	87,6		870	3,5	34	49	6,0	12,4	7,4
55. Zimbabwe	7,2		870	1,0	69	55	—	—	—
56. Cameron	8,7		880	2,8	—	50	9,4	5,3	6,8
57. Kuba	9,7		—	—	95	73	—	—	—
58. Republik Rakyat Congo	1,7	1.110		1,0	—	60	13,6	-1,8	2,2
59. Guatemala	7,5	1.140		2,6	—	59	7,3	5,9	5,4
60. Peru	17,0	1.170		1,0	80	58	3,4	2,9	3,5
61. Equador	8,6	1.180		4,3	81	62	12,5	10,8	8,7
62. Yamaika	2,2	1.180		0,8	90	71	-3,6	-2,6	—
63. Pantai Gading	8,5	1.200		2,3	35	47	9,3	5,8	5,8
64. Republik Dominika	5,6	1.260		3,3	67	62	7,6	6,1	6,7
65. Mongolia	1,7	—		—	—	64	—	—	—
66. Kolumbia	26,4	1.380		3,2	81	63	4,7	5,7	6,8
67. Tunisia	6,5	1.420		4,8	62	61	9,3	11,7	7,5
68. Kosta Rika	2,3	1.430		3,0	90	73	7,4	7,1	5,2
69. Republik Demokrasi Korea	18,7	—		—	—	66	—	—	—
70. Turki	45,5	1.540		3,5	60	62	6,1	5,5	6,2
71. Suriah	9,3	1.570		3,8	58	65	9,8	8,2	10,8
72. Yordania	3,4	1.620		—	70	62	—	—	—
73. Paraguai	3,1	1.630		3,5	84	65	11,0	8,1	9,1
<i>Negara-negara Berpendapatan Menengah Atas</i>									
74. Republik Korea	38,9	1.700		6,9	93	66	14,4	15,6	8,2
75. Iran	40,1	—		—	50	58	—	—	—
76. Irak	13,5	—		—	—	57	—	—	—
77. Malaysia	14,2	1.840		4,3	60	65	9,3	11,1	8,5
78. Panama	1,9	1.910		3,1	85	71	4,1	2,7	5,3
79. Libanon	2,7	—		—	—	66	—	—	—
80. Aljazair	19,6	2.140		3,2	35	56	7,6	11,6	6,4
81. Brazil	120,5	2.220		5,1	76	64	9,1	8,7	8,3
82. Meksiko	71,2	2.250		3,8	83	66	7,4	7,1	6,6
83. Portugal	9,8	2.520		4,8	78	72	4,4	4,5	6,0
84. Argentina	28,2	2.560		1,9	93	71	1,4	0,7	2,2
85. Chili	11,3	2.560		0,7	—	68	0,7	—	2,9
86. Afrika Selatan	29,5	2.770		2,3	—	63	—	—	—
87. Yugoslavia	22,5	2.790		5,0	85	71	6,8	7,1	5,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88. Uruguay	2,9	2.820	1,6	94	71	3,5	4,3	2,9
89. Venezuela	15,4	4.220	2,4	82	68	2,7	5,3	5,9
90. Yunani	9,7	4.420	5,4	—	74	4,5	5,5	5,2
91. Hongkong	5,2	5.100	6,9	90	75	—	10,1	—
92. Israel	4,0	5.160	3,6	—	73	—	—	—
93. Singapura	2,4	5.240	7,4	83	72	9,0	9,7	8,5
94. Trinidad & Tobago	1,2	5.670	2,9	95	72	4,0	1,3	6,9
<i>Negara-negara Pengekspor Minyak Berpendapatan Tinggi</i>								
95. Libia	3,1	8.450	4,7	—	57	3,1	14,7	17,1
96. Saudi Arabia	9,3	12.600	7,8	25	55	10,2	6,5	12,2
97. Kuwait	1,5	20.900	-0,4	60	70	-2,2	9,2	9,6
98. Uni Emirat Arab	1,1	24.660	—	56	63	—	—	—
<i>Negara-negara Industri Maju</i>								
99. Irlandia	3,4	5.230	3,1	98	73	—	—	—
100. Spanyol	38,0	5.640	4,2	—	74	3,9	6,0	4,5
101. Italia	56,2	6.960	3,6	98	74	2,9	3,7	3,2
102. Selandia Baru	3,3	7.700	1,5	99	74	—	—	—
103. Inggris	56,0	9.110	2,1	99	74	0,4	-0,5	2,5
104. Jepang	117,6	10.080	6,3	99	77	5,6	6,5	4,2
105. Austria	7,6	10.210	4,0	99	73	3,2	3,4	3,9
106. Finlandia	4,8	10.680	3,6	100	75	3,3	3,7	3,6
107. Australia	14,9	11.080	2,5	100	74	—	—	—
108. Kanada	24,2	11.400	3,3	99	75	2,9	3,2	4,3
109. Belanda	14,2	11.790	3,1	99	76	2,0	2,6	3,7
110. Belgia	9,9	11.920	3,8	99	73	3,1	3,0	3,5
111. Perancis	54,0	12.190	3,8	99	76	2,7	3,2	4,2
112. Amerika Serikat	229,8	12.820	2,3	99	75	2,3	2,9	3,3
113. Denmark	5,1	13.120	2,6	99	75	1,1	3,1	2,5
114. Republik Federasi Jerman	61,7	13.450	3,2	99	73	—	2,1	2,5
115. Norwegia	4,1	14.060	3,5	99	76	5,0	1,3	4,5
116. Swedia	8,3	14.870	2,6	99	77	0,8	0,7	2,7
117. Swiss	6,4	17.430	1,9	99	76	—	—	—
<i>Negara-negara Eropa Timur</i>								
118. Albania	2,8	—	—	—	70	—	—	—
119. Hungaria	10,7	2.100	5,0	99	71	5,8	5,9	5,0
120. Rumania	22,5	2.540	8,2	98	71	9,2	—	—
121. Bulgaria	8,9	—	—	—	73	—	—	—
122. Polandia	35,9	—	—	98	73	—	—	—
123. Uni Soviet	268,0	—	—	100	72	—	—	—
124. Ceko-slowakia	15,3	—	—	—	72	—	—	—
125. Republik Demokrasi Jerman	16,7	—	—	—	73	—	—	—

lihat bahwa pertumbuhan negara-negara tersebut, terutama mengenai sektor-sektor dalam bidang sosial budaya dan sosial ekonominya, masih rendah dan jauh tertinggal dari kemajuan yang dicapai oleh negara-negara Barat (lihat Tabel 1).² Di antaranya terlihat bahwa angka usia harapan hidup dari 34 negara yang tergolong dalam negara-negara berpendapatan rendah rata-rata hanya sekitar 50 tahun dan angka kemampuan membacanya hanya sekitar 40%. Angka usia harapan hidup dan kemampuan membaca di negara-negara berpendapatan rendah tersebut ternyata tidak jauh berbeda dalam 60 negara yang tergolong dalam negara-negara berpendapatan menengah. Kemajuan dan tingkat pertumbuhan sektor-sektor industri, manufaktur dan jasa-jasa dalam negara-negara berpendapatan rendah dan menengah juga masih rendah dan sangat lamban dibandingkan dengan negara-negara Barat.

Rendah dan lambannya pertumbuhan sektor-sektor sosial-budaya dan sosial-ekonomi negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, yang sebagian besar berada di benua Asia, Afrika dan Amerika Latin itu, berkaitan erat dan saling mempengaruhi dengan pertumbuhan sektor komunikasi dan informasinya. Data UNESCO menyebutkan bahwa jumlah lalu-lintas pos dalam tahun 1976 di Afrika adalah sebanyak 4,2 milyar, di Asia sebanyak 26,1 milyar dan di Amerika Latin sebanyak 3,4 milyar, sedangkan di Amerika Utara sebanyak 96,6 milyar dan Eropa sebanyak 70,4 milyar. Jumlah pesawat radio di Afrika sebanyak 30 juta, di Asia sebanyak 113 juta dan di Amerika Latin sebanyak 58 juta, sedangkan di Amerika Utara sebanyak 454 juta dan di Eropa sebanyak 284 juta.³

Konsumsi kertas, kapasitas tempat duduk gedung bioskop, persentase distribusi surat kabar, radio dan buku di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin pun lebih kecil daripada di negara-negara Barat. Jumlah konsumsi kertas per 1.000 orang penduduk per tahun di Afrika (tidak termasuk negara-negara Arab) sebanyak 900 kg, di Asia (tidak termasuk negara-negara Arab) sebanyak 2,6 ribu kg, di negara-negara Arab sebanyak 1,5 ribu kg dan di Amerika Latin sebanyak 4,3 ribu kg, sedangkan di Amerika Utara sebanyak 66,9 ribu kg dan di Eropa sebanyak 23,2 ribu kg. Kapasitas tempat duduk gedung bioskop per 1.000 orang penduduk di Afrika 4 kursi, di Asia 8,6 kursi, di negara-negara Arab 7,4 kursi dan di Amerika Latin sebanyak 22 kursi, sedangkan di Amerika Utara 52 kursi dan di Eropa sebanyak 39 kursi. Sirkulasi surat kabar harian per 1.000 orang penduduk di Afrika 13 eksemplar, di Asia 65 eksemplar, di negara-negara Arab 20 eksemplar dan di Amerika Latin 70 eksemplar, sedangkan di Amerika Utara 281 eksemplar dan di Eropa 243 eksemplar.

²*World Development Report 1983*, hal. 148-151.

³Sean MacBride et al., *Many Voices, One World* (Paris: UNESCO, 1980), hal. 53 dan hal. 61.

Persentase distribusi surat kabar harian di Afrika (tidak termasuk negara-negara Arab) 1%, di Asia (tidak termasuk negara-negara Arab) 21,8%, di negara-negara Arab 0,7% dan di Amerika Latin 5,6%, sedangkan di Amerika Utara 16,2% dan di Eropa 28,2%. Persentase distribusi pesawat penerima radio di Afrika 1,9%, di Asia 11,2%, di negara-negara Arab 1,9% dan di Amerika Latin 8,8%, sedangkan di Amerika Utara 44,9% dan di Eropa 16,5%. Persentase distribusi buku di Afrika 1,4%, di Asia 16,4%, di negara-negara Arab 1% dan di Amerika Latin 5,2%, sedangkan di Amerika Utara 15,4% dan di Eropa sebanyak 45,6% (lihat Tabel 2).

Tabel 2

DISTRIBUSI SURAT KABAR, RADIO DAN BUKU SERTA KONSUMSI KERTAS,
KAPASITAS TEMPAT DUDUK BIOSKOP DAN SIRKULASI SURAT KABAR

Area	Distribusi Surat Kabar (%)	Distribusi Radio (%)	Distribusi Buku (%)	Konsumsi Kertas Per 1.000 orang/kg	Kapasitas Bioskop Per 1.000 orang (kursi)	Sirkulasi Surat Kabar Per 1.000 orang (eksemplar)
Afrika (tidak termasuk negara-negara Arab)	1,0	1,9	1,4	900	4,0	13
Amerika Utara	16,2	44,9	15,4	66.900	52,0	281
Amerika Latin	5,6	8,8	5,2	4.300	22,0	70
Asia (tidak termasuk negara-negara Arab)	21,8	11,2	16,4	2.600	8,6	65
Negara-negara Arab	0,7	1,9	1,0	1.500	7,4	20
Eropa	28,2	16,5	45,6	23.200	39,0	243
Oceania	1,7	1,5	0,8	11.000	30,0	305
Uni Soviet	24,8	13,3	14,2	4.900	98,0	396

Sumber: Unesco Statistical Yearbook 1977, dalam Sean MacBride et al., *Many Voices, One World* (Paris: UNESCO, 1980), hal. 125.

Data-data komunikasi dan informasi di Asia tersebut, menunjukkan juga bahwa sebagian besar distribusi surat kabar, pesawat radio, televisi, buku serta konsumsi kertas, kapasitas tempat duduk gedung bioskop, sirkulasi surat kabar dan pesawat telepon didominasi oleh Jepang. Beberapa data menyebutkan bahwa sebanyak 48,6 juta buah pesawat telepon atau 89% dari 54,9 juta buah pesawat telepon di Asia dan sebanyak 45,9 milyar percakapan telepon atau 73% dari 62,7 milyar percakapan telepon di Asia terdapat di Jepang. Kemudian, sebanyak 57,8 juta eksemplar surat kabar harian atau 66% dari 87,6 juta eksemplar surat kabar di Asia, 59,7 juta buah pesawat radio atau 46% dari 129,4 juta pesawat radio di Asia dan 26,8 juta buah pesawat

televisi atau 63% dari 42,8 juta buah pesawat televisi yang beredar di Asia terdapat di Jepang.

Data UNESCO tahun 1980 juga menunjukkan bahwa perkembangan media komunikasi dan informasi di negara-negara berkembang belum dapat mengejar kemajuan yang dicapai oleh negara-negara maju. Empat puluh negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin belum mempunyai kantor berita nasional. Sementara itu, sirkulasi surat kabar harian per 1.000 orang penduduk di 10 negara Afrika baru sekitar 20 eksemplar, bahkan di 9 negara Afrika lainnya sama sekali tidak mempunyai surat kabar harian, sedangkan di negara-negara Eropa telah mencapai sekitar 200-500 eksemplar. Jumlah pesawat radio dan televisi per 1.000 orang penduduk di negara-negara berkembang juga masih sangat rendah, yaitu jumlah pesawat radio di negara-negara berpendapatan rendah sebanyak 27,3 buah dan di negara-negara berpendapatan menengah sebanyak 105,3 buah, sedangkan di negara-negara maju telah mencapai 913,6 buah. Dan jumlah pesawat televisi di Asia sekitar 50 buah, di Afrika kurang dari 10 buah setiap 1.000 orang, bahkan banyak negara Afrika yang belum terjangkau oleh siaran televisi.⁴

Kemajuan yang telah dicapai oleh Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa Barat dan Jepang itu ternyata tidak hanya pada jenis-jenis media komunikasi itu, melainkan juga pada instalasi komputer. Suatu laporan Badan Komunikasi Jepang menunjukkan bahwa dari seluruh instalasi komputer di dunia, sebanyak 45,4% berada di Amerika Serikat, sebanyak 10,1% di Jepang, sebanyak 7,9% di Jerman Barat, sebanyak 5,8% di Inggris, sebanyak 5,8% di Perancis, sebanyak 2,8% di Kanada, sebanyak 2,6% di Italia serta sebanyak 6,7% terdapat di Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur.⁵

Perkembangan sektor komunikasi dan informasi di negara-negara maju itu semakin pesat setelah berhasil dikembangkannya teknologi komunikasi dan informasi yang lebih mutakhir. Kemajuan teknologi komunikasi menjadi semakin cepat, setelah unsur-unsurnya mengalami pengembangan yang pesat, baik mengenai teknologi pengiriman, penyaluran, pembagian maupun teknologi penerimaan pesannya. Di antaranya, dalam teknologi pengirimannya, terjadi pengembangan radio sel, pemancar televisi berdaya rendah dan satelit siaran langsung, sehingga memungkinkan percakapan telepon, siaran radio dan televisi jarak jauh, serta mampu menjangkau wilayah yang sangat luas. Dalam teknologi penyaluran, telah berhasil dikembangkan kabel serat optik yang mampu mengantarkan komunikasi secara lebih baik, cepat dan berkapasitas tinggi serta memungkinkan telepon visual. Dalam teknologi pemba-

⁴F. Rachmadi, "Menuju Terwujudnya Tata Internasional Baru di Bidang Penerangan dan Komunikasi," *Kompas*, 16 Januari 1984.

⁵Sean MacBride et al., *op. cit.*, hal. 130.

gian, telah berhasil ditemukannya sistem paket *switching*, sedangkan dalam teknologi penerimaannya telah dikembangkan stasiun bumi rumah tangga untuk menangkap satelit siaran langsung dan terminal telepon yang berfungsi ganda. Dalam teknologi informasinya, telah terjadi juga kemajuan yang sangat pesat, baik mengenai teknologi pengumpulan, perekaman, penyimpanan maupun pengolahan informasi. Di antaranya, telah berhasil dikembangkan instalasi komputer yang lebih kecil tetapi mempunyai kemampuan yang lebih besar. Apalagi keberhasilannya dalam memadukan teknologi komunikasi dan informasi atau yang lebih dikenal dengan teknologi komunikasi, komputer dan kendali, telah memungkinkan berkembangnya berbagai produk teknologi komunikasi dan informasi yang lebih murah dan bermutu tinggi.⁶

Akibat revolusi dalam teknologi komunikasi dan informasi itu, dunia ini terasa semakin kecil dan saling berhubungan sebagai satu kesatuan. Komunikasi di dunia ini lebih bersifat global, dalam hal mana jaringan-jaringannya mampu menghubungkan berbagai sub-sistem komunikasi, baik dalam sub-sub sistem komunikasi internasional, regional, nasional maupun lokal.

MASALAH TATA INFORMASI DUNIA BARU

Dalam sistem komunikasi yang bersifat global itu, keadaan komunikasi di negara-negara berkembang, yang sebagian besar berada di benua Asia, Afrika dan Amerika Latin, ataupun yang bergabung dalam Gerakan Non-Blök, masih sangat terbatas. Dengan terbatasnya keadaan komunikasi, baik mengenai jumlah pers, buku, barang-barang cetakan, radio, televisi, film maupun media telekomunikasi dan komputernya, maka dapat diduga bahwa arus komunikasi di negara-negara tersebut, baik dalam tingkat nasional maupun lokalnya, tidak lancar atau timpang.

Lagipula, walaupun negara-negara tersebut telah mempunyai berbagai jenis media komunikasi itu, dapat diduga juga bahwa aspek-aspek teknologinya, baik mengenai perangkat keras maupun perangkat lunak, berasal dari negara-negara Dunia Pertama atau Dunia Kedua. Padahal sebagian besar negara berkembang belum sempat mengidentifikasi peranan teknologi dari setiap media komunikasi itu, apalagi pemanfaatan maupun penguasaannya. Oleh karena itu, keadaan ini sering menimbulkan masalah sosial di negara-negara berkembang, yang mungkin tidak terjadi atau tidak dikenal di negara-negara asalnya.

Masalah komunikasi di negara-negara berkembang sering menjadi rumit dan kompleks, karena sering kali terjadi perubahan sistem politik atau proses regenerasi secara tidak sehat. Apalagi banyak negara berkembang memiliki

⁶M. Alwi Dahlan, "Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Perimbangan Informasi," *Suara Karya*, 24 Januari 1984.

masyarakat yang sangat beraneka-ragam dari segi kebudayaannya maupun tingkat perkembangan dan perbedaan tingkat keterbukaannya. Hal ini menuntut peranan media komunikasi yang lebih besar, yaitu di samping berperan sebagai penunjang terwujudnya integrasi nasional, juga membangkitkan pertumbuhan seluruh masyarakat sub-nasionalnya. Keadaan masyarakat seperti itu sering kurang mendapat perhatian, sehingga kebijaksanaan komunikasi yang dilahirkannya mengakibatkan masalah baru, yaitu informasi atau pesan-pesan yang ada dalam berbagai media komunikasi tidak sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakatnya. Bahkan, rendahnya kemampuan sosial-budaya dan sosial-ekonomi masyarakatnya, menyebabkan isi pesan yang terkandung dalam berbagai jenis media massa modern sangat sulit dicerna atau diserap oleh warga masyarakat negara-negara berkembang.

Sebaliknya di negara-negara maju, rakyatnya mempunyai akses yang luas terhadap segala jenis media komunikasi massa, sehingga mudah memperoleh informasi yang berimbang dalam volume dan waktu yang relatif sangat cepat. Hampir seluruh warga negaranya mampu membeli surat kabar, buku, radio, televisi, telepon dan pesawat video dan sebagian besar warga negaranya mempunyai akses terhadap televisi kabel, pemancar radio pribadi, komputer pribadi, serta mampu menangkap satelit siaran langsung dan mengadakan komunikasi dengan pusat-pusat informasi. Bahkan, organisasi-organisasi informasi di negara-negara maju memiliki prasarana komunikasi yang teknologinya sangat mutakhir, sehingga mampu menyalurkan informasi ke seluruh dunia secara lebih cepat, murah dan bermutu tinggi.

Kehadiran organisasi-organisasi informasi negara-negara maju, yang jangkauan kemampuannya melintasi batas-batas negaranya, seperti Associated Press (AP) dan United Press International (UPI) dari Amerika Serikat, Agence France Press (AFP) dari Perancis, serta Reuter dari Inggris, bahkan menjadi sumber utama informasi dunia bagi kantor-kantor berita nasional negara-negara berkembang. Namun kehadiran tersebut semakin meresahkan dan menegangkan hubungan negara-negara Non-Blok dengan negara-negara maju. Negara-negara Non-Blok menganggap bahwa organisasi-organisasi informasi transnasional itu senantiasa mengabaikan berita-berita dari negara-negara Non-Blok. Kalaupun menyiarkan, berita-berita mengenai negara-negara Non-Blok yang disiarkannya cenderung bernada negatif. Sebaliknya, sebagian besar berita yang disiarkannya adalah mengenai negara-negara maju, negara-negara sekutunya atau yang lebih menguntungkan negara-negara maju dan sekutunya.⁷

Ketimpangan arus, isi dan akses terhadap jalur informasi tersebut menjadi salah satu topik utama dalam Gerakan Non-Blok. Untuk mengatasi dominasi

⁷S.C. Parasher, "New World Information Order," *India Quarterly*, Vol. XXXIX, No. 2, April-Juni 1983, hal. 173.

organisasi-organisasi informasi transnasional negara-negara maju, telah dibentuk pool kantor berita Non-Blok, yaitu Non-Aligned News Agency's Pool (NANAP) dan badan penyiaran Non-Blok, yaitu Broadcasting Organization of Non-Aligned Countries (BONAC). NANAP terutama berfungsi untuk menciptakan distribusi berita-berita, acara-acara dan foto-foto yang menyangkut negara-negara anggotanya di kalangan negara-negara Non-Blok. Sementara itu BONAC berfungsi menyelenggarakan kerjasama di bidang program radio dan televisi serta pertukaran informasi secara umum.

Bahkan masalah ketimpangan informasi itu telah menjadi bahan pembicaraan utama dalam Konperensi Tingkat Tinggi Negara-negara Non-Blok di Kolombo dalam tahun 1976. Konperensi tersebut berhasil melahirkan konsepsi Tata Informasi Dunia Baru. Dengan konsepsi ini, negara-negara Non-Blok menghendaki diciptakannya arus, isi dan akses terhadap jalur informasi dunia yang adil dan berimbang, terutama menuntut dilenyapkannya monopoli pemberitaan dan ketidakimbangan penyebaran arus informasi yang mengalir satu arah dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Konsepsi ini terus dimatangkan dalam Gerakan Non-Blok sendiri, yaitu dalam Konperensi Tingkat Tinggi di New Delhi dalam tahun 1983, yang memutuskan diselenggarakannya Konperensi Menteri Penerangan Non-Blok (COMINAC). Sehubungan dengan keputusan itu, telah diselenggarakan COMINAC I di Jakarta pada tanggal 26-30 Januari 1984, yang antara lain menyepakati perlunya kerjasama di bidang pemberitaan, telekomunikasi dan penerbitan barang-barang cetakan, serta mengeluarkan Himbauan Jakarta (*Jakarta Appeal*).⁸ Di samping itu, konsepsi Tata Informasi Dunia Baru juga terus diperjuangkan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya dalam UNESCO, dan forum-forum internasional.

Dalam perjuangan mewujudkan Tata Informasi Dunia Baru, baik dalam UNESCO maupun forum-forum internasional lainnya, ada kesan bahwa perjuangan gerakan ataupun negara-negara Non-Blok menghadapi masalah yang sangat rumit. Negara-negara Barat agaknya tetap menghendaki berlakunya kebebasan arus informasi seperti yang termaktub dalam Pernyataan Umum Hak-hak Manusia PBB. Dalam Pasal 19 dari Pernyataan Umum Hak-hak Manusia PBB dinyatakan: "setiap orang berhak akan kebebasan untuk mempunyai pendapat sendiri dan melahirkan pikiran-pikirannya; dalam hak ini termasuk kebebasan untuk mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak boleh dicampuri serta mencari, menerima dan menyiarkan keterangan dan pikiran-pikiran dengan perantaraan alat pengantar apa pun juga serta dengan tidak usah mengindahkan batas-batas negara."⁹ Namun, negara-negara berkembang atau Non-Blok mempunyai persepsi yang agak berbeda dengan

⁸*Suara Karya*, 31 Januari 1984.

⁹*Ensiklopedia Indonesia* (Bandung: NV Penerbitan W. van Hoeve), hal. 27.

negara-negara Barat. Negara-negara Non-Blok mengakui adanya kebebasan arus informasi, tetapi setiap hak akan kebebasan harus diimbangi dengan kewajiban. Dan jika organisasi-organisasi informasi transnasional menuntut hak itu, mereka harus pula melaksanakan kewajiban yang seimbang dengan tuntutanannya, supaya negara-negara berkembang, terutama yang masih sangat lemah tidak dieksploitasi terus-menerus.

Perbedaan pendapat mengenai kebebasan informasi, baik mengenai arus, isi maupun akses terhadap jalur informasi, rupanya telah memuncak dalam sidang-sidang UNESCO. Dan, walaupun UNESCO telah mengeluarkan pernyataan mengenai perlu dilaksanakannya kebebasan arus dan informasi dalam keseimbangan yang lebih luas dan baik, ketegangan antara negara-negara Non-Blok dan negara-negara Barat mengenai Tata Informasi Dunia Baru belum berakhir. Sehubungan dengan pernyataan itu, negara-negara Barat telah menunjukkan reaksinya terhadap organisasi UNESCO itu sendiri. UNESCO antara lain dinilai telah melakukan peran politik secara berlebihan yang sebenarnya bukan wewenangnya, serta tidak memiliki administrasi personal dan keuangannya yang tertib. Bahkan, sebagai kelanjutan dari ketegangan itu Amerika Serikat telah mengundurkan diri dari UNESCO,¹⁰ dan mungkin sekali akan diikuti oleh negara-negara sekutunya dan negara-negara lain, seperti Inggris, Jerman Barat, Jepang, Korea Selatan dan Singapura.

Makin banyaknya negara-negara maju yang mengundurkan diri dari keanggotaan UNESCO dapat menggoyahkan, bahkan mengancam eksistensi UNESCO dan justru dapat merugikan perjuangan gerakan dan negara-negara Non-Blok. Oleh karena itu, cara-cara dan bentuk-bentuk perjuangan gerakan dan negara-negara Non-Blok yang revolusioner atau radikal perlu ditinjau atau dirumuskan kembali (redefinisi) berdasarkan prinsip-prinsip dan tujuan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Gerakan Non-Blok. Karena, jika pengunduran diri negara-negara maju itu sampai menjalar pada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, apalagi jika prinsip-prinsip dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Non-Blok yang demikian luhur diabaikan ataupun diselewengkan oleh semua pihak, maka perjuangan untuk mewujudkan Tata Informasi Dunia Baru justru akan merusak usaha-usaha pencapaian tujuan yang lebih besar, yaitu terciptanya keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan Tata Informasi Dunia Baru masih akan memakan waktu pan-

¹⁰Barthold C. Witte, "UNESCO — Crisis and Reform," *Aussen Politik*, Vol. 35, No. 3 Tahun 1984, hal 262.

jang, karena masalah yang dihadapinya sangat berat dan kompleks, dan bukan semata-mata masalah ketimpangan arus, isi dan akses terhadap jalur informasi. Masalah ketimpangan informasi itu sendiri sebetulnya lebih berakar pada masalah kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi komunikasi dan informasi. Namun kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak hanya didominasi oleh negara-negara maju atau Dunia Pertama, melainkan juga negara-negara Dunia Kedua. Lagipula, dalam kenyataannya keberhasilan banyak negara berkembang dalam meningkatkan berbagai sektor sosial-budaya dan sosial-ekonominya tidak terlepas dari bantuan negara-negara maju. Ini barangkali menjadi penyebab kegusaran negara-negara maju terhadap cara-cara dan bentuk-bentuk perjuangan Gerakan Non-Blok yang dianggap lebih menguntungkan negara-negara Dunia Kedua. Oleh karena itu, ditegaskan Senator Hanna-Renate Laurien dari Jerman Barat, propaganda negara-negara berkembang yang hanya berupa tuntutan, teriakan-teriakan dan jeritan-jeritan histeris tidak ada manfaatnya.¹¹

Kerjasama dan solidaritas negara-negara berkembang, terutama yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok dalam mewujudkan Tata Informasi Dunia Baru sangat diperlukan. Tetapi yang lebih utama adalah peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh rakyat negara-negara berkembang ataupun negara-negara Non-Blok sendiri. Untuk menjawab tantangan ini, pembangunan nasional, terutama pembangunan sektor-sektor ilmu pengetahuan, teknologi serta komunikasi dan informasi dalam negara-negara berkembang, harus ditingkatkan dan dipercepat. Sehubungan dengan itu, konsepsi komunikasi pembangunan yang menekankan bahwa segenap proses komunikasi diorientasikan pada pembangunan perlu terus dikembangkan. Usaha ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan jumlah warga negara yang mampu menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga seluruh bidang kegiatan dalam negara-negara berkembang ataupun Non-Blok, termasuk sektor komunikasi, informasi dan kewartawanannya, dapat ditangani para warga negaranya sendiri yang benar-benar telah memiliki kemampuan profesional. Makin mengakar serta suburinya kehidupan profesional dalam masyarakat merupakan modal utama bagi negara-negara berkembang ataupun Non-Blok untuk mengembangkan dirinya sebagai produsen ataupun pusat informasi. Bila tingkat perkembangan ini benar-benar telah dicapai, maka mereka akan mampu menempatkan dirinya sejajar dengan negara-negara Dunia Pertama dan Dunia Kedua. Secara demikian perjuangan dalam mewujudkan Tata Informasi Dunia Baru mustahil tidak akan berhasil.

¹¹Barthold C. Witte, *ibid.*, hal. 265.